

ANALISIS PENGARUH IPM, UPAH MINIMUM, DAN PDRB TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Ni Kadek Dina Ambarini¹

Ni Luh Karmini²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,
Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh IPM, Upah Minimum dan PDRB secara simultan terhadap tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dan menganalisis pengaruh IPM, Upah Minimum dan PDRB secara parsial terhadap tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data IPM, Upah Minimum, PDRB, dan tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2015-2020 sehingga diperoleh jumlah pengamatan yaitu 54 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Software yang digunakan adalah Eviews. IPM, Upah Minimum, dan PDRB secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. IPM secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Upah Minimum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. PDRB secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Kata kunci: *Pengangguran, IPM, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto*

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of HDI. Simultaneously the Minimum Wage and GRDP on the Regency/City Unemployment Level in Bali Province, and analyze the effect of HDI. Minimum Wage and GRDP partially to Regency/City Unemployment level in Bali Province. The data used are secondary data, namely HDI, Minimum Wage, GRDP, and Regency/City Unemployment levels in Bali Province from 2015-2020 so that the number of observations is 54 observations. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The software used is Eviews. HDI, Minimum Wage, and GRDP simultaneously have a positive effect on the unemployment rate in districts/cities in the province of Bali. HDI partially does not have a positive and significant effect on the Regency/City unemployment rate in the Province of Bali. The Minimum Wage partially has a positive and significant effect on the Regency/City unemployment rate in the Province of Bali. PDRB partially does not have a positive and significant effect on the unemployment rate in the Regency/City in the Province of Bali.

Keywords: Unemployment, HDI, Minimum Wage, Gross Regional Domestic Product

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di berbagai daerah dan di segala

bidang (Dewi, 2017). Pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai perubahan diberbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Baeti, 2013). Pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Aristina, 2017). Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan belum mendapatkan hasil maksimal, masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah seperti pengangguran dan masalah-masalah sosial lainnya (Sopianti, 2013). Masalah pengangguran merupakan masalah yang sering dihadapi oleh semua negara di Dunia termasuk Indonesia. Jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan, salah satunya adalah pengangguran (Mentari, 2016). Faktor penyebab timbulnya pengangguran diantaranya rendahnya tingkat upah yang berlaku. Tenaga kerja rela untuk tidak bekerja (menganggur) karena tingkat upah yang berlaku rendah, disebut pengangguran sukarela (Seran, 2017).

Pengangguran didefinisikan adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2004). Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, inidividu dan masyarakat, seperti pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan kesejahteraan yang mungkin dicapai. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang sehingga akan menghambat pembangunan ekonomi dan pengangguran tidak akan menggalakkan perekonomian (Sirait, 2013). Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang dikenal karena daerah pariwisatanya. Meskipun demikian, angka pengangguran masih saja tinggi di Bali. Ini merupakan suatu ironi daerah pariwisata sudah seharusnya mampu menyerap tenaga kerja. Masalah

Analisis Pengaruh Ipm, Upah Minimum... [Ni Kadek Dina Ambarini, Ni Luh Karmini] pengangguran di Provinsi Bali sangat penting untuk dibahas karena terjadi ketidakmerataan tingkat pengangguran antar kabupaten/kota di provinsi Bali yang disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah potensi sumber daya alam suatu daerah yang berbeda-beda (Dirga, 2017). Berikut tabel 1 presentasi pengangguran menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Tabel 1. Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Kabupaten/Kota	Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	1,59	1,13	0,67	1,41	1,44	4,52
Tabanan	1,73	1,76	1,79	1,45	1,29	4,21
Badung	0,34	0,41	0,48	0,46	0,40	6,92
Gianyar	1,93	1,47	1,02	1,61	1,46	7,53
Klungkung	1,39	1,16	0,94	1,47	1,57	5,42
Bangli	1,72	1,10	0,48	0,81	0,75	1,86
Karangasem	2,15	1,43	0,72	1,03	0,62	2,42
Buleleng	2,04	2,22	2,41	1,88	3,12	5,19
Denpasar	3,54	3,08	2,63	1,87	2,29	7,62
Provinsi Bali	1,99	1,89	1,48	1,40	1,57	5,63

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021*

Tabel 1 menjelaskan Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen). Provinsi Bali jumlah persentase pengangguran pada tahun 2015 sebesar 1,99 persen dan mengalami penurunan persentase pengangguran sampek pada tahun 2018 sebesar 1,40 persen. Mengalami peningkatan lagi pada persentase pengangguran pada tahun 2019 sebesar 1,57 persen, pada tahun 2020 merupakan persentase pengangguran tertinggi yaitu sebesar 5,63 persen. Kabupaten yang memiliki persentase pengangguran yang tinggi yaitu Kota Denpasar sebesar 7,62 persen pada tahun 2020 dan di ikuti oleh Kabupaten Gianyar sebesar 7,53 persen. Kabupaten yang memiliki persentase terkecil yaitu Kabupaten Bangli sebesar 1,86 persen.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan IPM. Pada

dasarnya, peningkatan jumlah penduduk memiliki dua sisi yang berbeda. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, tetapi di sisi lain dengan pengaturan yang tidak tepat, jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan penduduk yang sangat krusial terutama dibidang ketenagakerjaan. Tingginya pertumbuhan penduduk apabila tidak disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka mereka tidak mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut. Daya manusia dapat diukur melalui besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang (Nurcholis, 2014). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk dapat hidup layak.

Menurut Napitupulu (2007), indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup layak. Semakin baik tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang

tinggi dan memperoleh hidup yang layak, maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas, justru sebaliknya semakin buruk keadaan tenaga kerja, maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk pula atau tidak berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap untuk berkerja sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah. Semakin baik tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup yang layak, maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas, justru sebaliknya semakin buruk keadaan tenaga kerja, maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk pula atau tidak berkualitas.

Pengentasan pengangguran dapat ditanggulangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan) merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan, maka dari itu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkaitan dan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, karena manusia bukan hanya merupakan objek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu Negara, dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dapat mempengaruhi tingkat pengangguran (Hidayat, 2020).

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi pengangguran yaitu upah minimum. Upah juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran suatu daerah, karena rendahnya tingkat upah dapat pula menjadi masalah ketenagakerjaan di Provinsi Bali. Penetapan tingkat upah merupakan kewenangan dari pemerintah yang berpengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan oleh pemerintah, maka akan

menyebabkan semakin sedikit pula jumlah tenaga kerja yang bekerja. Penentuan tingkat upah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian suatu daerah yang memacu terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Artinya, semakin baik kondisi perekonomian suatu daerah, maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sehingga penentuan tingkat upah juga semakin meningkat (Mentar, 2016).

Menurut Alghofari (2010:15), tenaga kerja menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu. Jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seorang pekerja akan menolak mendapatkan upah tersebut dan hal ini akan menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Apabila ditinjau dari sisi pengusaha, meningkatnya upah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat pada peningkatan pengangguran.

Teori dana upah yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, mengatakan bahwa tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Teori klasik juga menjelaskan bahwa cara mengatasi pengangguran adalah dengan mengurangi tingkat upah. Teori klasik menganggap bahwa jika upah turun maka permintaan pasar akan tenaga kerja akan meningkat.

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi pengangguran adalah PDRB, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu

Analisis Pengaruh Ipm, Upah Minimum... [Ni Kadek Dina Ambarini, Ni Luh Karmini]
indikator tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai tingkat kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Pada kenyataannya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB suatu wilayah meningkat, maka jumlah output dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan menurun. Output yang jumlahnya menurun akan menyebabkan terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja.

Menurut Todaro, 2008 pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur sebuah keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menganalisis tentang pembangunan ekonomi daerah. Terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah harus ditandai dengan perubahan perekonomian daerah yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Mankiw, 2000).

Hukum Okun mengatakan bahwa jika pengangguran turun 1 persen maka PDRB nya akan meningkat sebesar 3 persen. Hal ini dapat terjadi karena jika PDRB pada setiap sektor mengalami peningkatan maka akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, karena peningkatan PDRB akan berkontribusi pada bertambahnya lowongan kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh secara negatif terhadap pengangguran. Karena jika PDRB mengalami peningkatan maka pengangguran di daerah tersebut akan mengalami berkurang.

METODE PENELITIAN

Penelitian Kuantitatif berbentuk asosiatif (hubungan) yaitu adalah

berbentuk analisis tentang korelasi atau hubungan maupun dalam analisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Marhaeni, 2019: 66). Berbentuk asosiatif karena tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan tiga variabel yaitu IPM, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dipilihnya lokasi Penelitian ini karena persentase pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki persentase pengangguran yang tinggi. Terutama di Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar yang memiliki persentase pengangguran yang tinggi. Penelitian ini menggunakan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, dan sumber-sumber lainya seperti buku-buku dan jurnal-jurnal ekonomi. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data IPM, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Jumlah pengamatan dalam penelitian ini ada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 2015 hingga 2020 (6 tahun), maka besarnya ukuran sampel adalah $9 \times 6 = 54$ pengamatan dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*.

Dalam penelitian ini terdapat 1 (satu) variabel dependen, yaitu Pengangguran dan 3 (tiga) variabel independen, yaitu IPM, Upah Minimum, dan PDRB. Berdasarkan hal tersebut maka metode analisis yang digunakan dalam regresi ini adalah regresi multiple regression, yang persamaannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots \dots \dots (1)$$

(Nata Wirawan, 2017)

Di mana:

Y	= Pengangguran
X ₁	= IPM
X ₂	= Upah Minimum
X ₃	= PDRB
β ₀	= Konstanta

$\beta_{(1,)} \beta_{(2,)} \beta_{(3)}$ = Koefisien Regresi
 μ_i = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	155.6636	27.21658	5.719439	0.0000
IPM	-2.277294	0.406385	-5.603778	0.0000
Upah Minimum	1.17E-05	1.28E-06	9.123208	0.0000
PDRB	-0.000688	0.000102	-6.746615	0.0000

(Sumber: Data diolah dengan evIEWS 9, 2021)

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh menggunakan program EvIEWS 9, di dapat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 155.663 - 2.277X_1 + 1.17X_2 - 0.00068X_3 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Y = Pengangguran
- X_1 = IPM
- X_2 = Upah Minimum
- X_3 = PDRB
- $\beta_{(1,)} \beta_{(2,)} \beta_{(3)}$ = Koefisien Regresi
- μ_i = Error Term

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan bantuan EvIEWS 9, Hasil analisis regresi linear berganda uji F, menunjukkan nilai probability yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ maka IPM, Upah Minimum, dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Koefisien determinasi (R-Square) menunjukkan bahwa variabel IPM, Upah Minimum dan PDRB berpengaruh tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali sebesar 80,7 persen, sedangkan 19,3 persen tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Hasil analisis regresi linear berganda uji t terhadap variabel IPM menunjukkan secara parsial IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soeharjoto dkk., (2021) bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia, dan penelitian Putra (2016) bahwa Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2010-2014.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kedudukan dan peran IPM dalam pembangunan akan lebih terlihat kalau dilengkapi dengan angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup yang layak.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencapaian IPM ini adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kasus tersebut, dan dipihak lain juga kurang nya sosialisasi tentang hal tersebut, sehingga menyebabkan buruknya IPM di Provinsi Bali dan mengakibatkan terjadinya pengangguran lebih banyak, dimana pemerintah dan pihak-pihak terkait terutama pemerintah Provinsi Bali hendaknya lebih mengoptimalkan pembangunan manusia melalui IPM, adapun masalah pengangguran terdidik hendaknya diatasi dengan meningkatkan lapangan kerja bagi pengangguran terdidik, meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang berbasis skill dan teknologi

Analisis Pengaruh Ipm, Upah Minimum... [Ni Kadek Dina Ambarini, Ni Luh Karmini] yang sesuai untuk menghadapi pasar kerja, maka dengan meningkatkan itu pengangguran akan bisa menurun di Provinsi Bali.

Hasil analisis regresi linear berganda uji t terhadap variabel Upah Minimum menunjukkan secara parsial Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nina Cahyani (2016), menyatakan upah minimum mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah pengangguran, dan penelitian Rofik dkk., (2018) menyatakan upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat.

Menurut Todaro (2000;327), tingkat upah dalam bentuk sejumlah uang dalam kenyataannya tidak pernah fleksibel dan cenderung terus-menerus turun karena lebih sering dan lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kekuatan institusional seperti tekanan serikat dagang atau serikat buruh. Meningkatnya upah minimum yang ditetapkan pemerintah dapat meningkatkan jumlah biaya ongkos produksi perusahaan. Meningkatnya biaya produksi dapat memiliki dampak pada naiknya harga input tenaga kerja sehingga permintaan akan tenaga kerja berkurang. Berkurangnya permintaan akan tenaga kerja dapat menaikkan pengangguran. Sedangkan sebaliknya yaitu menurunnya upah minimum dapat menurunkan ongkos produksi dan dapat menurunkan harga input faktor produksi tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan margin keuntungan perusahaan sehingga dapat menaikkan permintaan tenaga kerja serta mengurangi jumlah pengangguran.

Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat mengoptimalkan lagi upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak agar memotivasi masyarakat untuk bekerja serta mempertahankan kebijakan upah minimum agar dapat melindungi pekerja dari kesewenangan pemberi kerja dalam memberikan upah yang tidak layak. Pemerintah Provinsi Bali agar lebih mengembangkan atau memperluas lapangan pekerjaan tidak hanya

pada salah satu sektor saja melainkan pada semua sektor agar kesempatan kerja menjadi lebih banyak yang nantinya tenaga kerja lebih banyak terserap untuk mengurangi pengangguran di Provinsi Bali.

Hasil analisis regresi linear berganda uji t terhadap variabel PDRB menunjukkan secara parsial PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksamana (2016) menyatakan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran Kabupaten/Kota di Kalimantan barat, dan penelitian Sembiring dan Gatot (2019) menyatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2011 – 2017.

Hubungan antara tingkat GDP yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran didasarkan pada Hukum Okun (Okun's Law) yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat GDP suatu negara atau daerah. Hukum Okun yang mengatakan bahwa adanya hubungan negatif antara PDRB dengan tingkat pengangguran. PDRB yang tinggi ditandai dengan adanya peningkatan produksi barang dan jasa sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk meningkatkan produksi tersebut. Banyaknya tenaga kerja yang diserap untuk meningkatkan produksi maka akan mampu menurunkan tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran dengan alternatif pemerintah lebih mengupayakan pada pertumbuhan jenis padat karya. Dengan adanya pengaruh negatif PDRB terhadap penurunan pengangguran, dimana pemerintah Provinsi Bali lebih meningkatkan peran PDRB di berbagai sektor terutama sektor ekonomi yang bersifat padat karya seperti sektor pertanian dan industri-industri berskala kecil, diantaranya dengan mendorong kenaikan investasi melalui suasana yang kondusif dalam memberikan kemudahan prosedur kepada para investor

serta meningkatkan sarana dan prasarana di Provinsi Bali salah satunya dengan melakukan perbaikan infrastruktur baik di desa maupun di Kota.

SIMPULAN

1. IPM, Upah Minimum, dan PDRB secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.
2. IPM dan PDRB secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.
3. Upah Minimum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.

SARAN

1. Pemerintah dan pihak-pihak terkait terutama pemerintah Provinsi Bali hendaknya lebih mengoptimalkan pembangunan manusia melalui IPM, adapun masalah pengangguran terdidik hendaknya diatasi dengan meningkatkan lapangan kerja bagi pengangguran terdidik, dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang berbasis skill dan teknologi yang sesuai untuk menghadapi pasar kerja.
2. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan lagi upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak agar memotivasi masyarakat untuk bekerja serta mempertahankan kebijakan upah minimum agar dapat melindungi pekerja dari kesewenangan pemberi kerja dalam memberikan upah yang tidak layak. Pemerintah Provinsi Bali agar lebih mengembangkan atau memperluas lapangan pekerjaan tidak hanya pada salah satu sektor saja melainkan pada semua sektor agar kesempatan kerja menjadi lebih banyak yang nantinya tenaga kerja lebih banyak terserap untuk mengurangi pengangguran di Provinsi Bali.
3. PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Dengan adanya peningkatan PDRB terhadap penurunan pengangguran, diperlukan suatu usaha untuk mengurangi pengangguran misalnya dengan lebih meningkatkan peran PDRB di

berbagai sektor terutama sektor ekonomi yang bersifat padat karya seperti sektor pertanian dan industri-industri berskala kecil, diantaranya dengan mendorong kenaikan investasi melalui suasana yang kondusif dalam memberikan kemudahan prosedur kepada para investor serta meningkatkan sarana dan prasarana di Provinsi Bali salah satunya dengan melakukan perbaikan infrastruktur baik di desa maupun di Kota.

REFRENSI

- Alghofari, Farid. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980- 2017. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Aristina, Ita (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ep Unud, 6[5]: 677-704.
- Aziz, Khalid, Soeratno, Sri Ambarwati (2020). Determination Analysis of Regional Income Towards Domestic Regional Product With Regional Investment As A Moderator. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*. 1 (1), pp. 146-164.
- Baeti, Nur 2013. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *EDAJ* 2 (3).
- Cahyani, Nina (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, inflasi, dan investasi terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 1986-2015. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
- Cholili, Fatkhul Mufid. "Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)". *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, Januari 2014.
- Dewi, Feby Shinta (2017). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi Kota Denpasar Periode Tahun 1994-2013. *E-Jurnal Ep Unud*, 6 [1]: 20-35.
- Dirga, I Nyoman Bayu (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali Tahun 1995-2014. *E-Jurnal Ep Unud*, 6 [1]: 1-19
- Fatimah, Siti, Yusuf Hasbullah, Abdul Manan, Muhammad Alwi, Akung Daeng (2021). Analysis of Growth and Elasticity of Regional Native Income to Brutto Regional Domestic Product. *International Journal*

Analisis Pengaruh Ipm, Upah Minimum... [Ni Kadek Dina Ambarini, Ni Luh Karmini]

of Multicultural and Multireligious Understanding, 8 (5), pp. 375-384.

Finkayana, I Putu Arya dan Heny Urmila. 2016. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2004-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 5 No. 7.

Hariwan Peggy & Swaningrum Ayu. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 8 No. 1: 72-82. ISSN: 2301-8968.

Hidayat, Nanang (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Makassar. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Irawan Andi, 2015. *Regional Income Disparities In Indonesia: Measurements, Convergence Process, And Decentralisation. Bulletin Of Indonesian Economic Studies*. Issn: 0007-4918.

Kurniawan Septyono & Sulistyaningrum Eny. (2017). Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesi. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 2 Agustus 2017: 193-215 PISSN: 2301 - 8968 EISSN: 2303 – 0186.

Laksamana, Rio (2016). Pengaruh Pdrb Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 5(2), Hal. 111-134.

Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi- Qu*, 9(1), 51-72,

Marhaeni, A.A.I.N. dan Manuati Dewi, I.G.A. 2004. Buku Ajar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Marhaeni, A A I N dan Yuliarmi, Ni Nyoman (2019). METODE RISET Jilid 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Megantara, Dede Edwin (2020). Pengaruh Angka Melek Huruf Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 9 (1), hal. 91- 119.

Mentari, Ni Wayan (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Jumlah Investasi Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, 5 [6] : 692-712.

Merdekawaty, Rahmah, Dwi Ispriyanti, Sugito (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (Sar). *Jurnal Gaussian*, 5 (3), Hal. 525-534.

- Nata, Wirawan. (2017). *Statistika Ekonomi dan Bisnis (Buku 2: Statistika Inferensia)*. Keraras Emas Denpasar.
- Napitulu, Apriliyah S. 2007. Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Penduduk Miskin di Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
- Nurcholis, Muhammad. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Oka Artana Yasa I Komang & Arka Sudarsana. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 8 No. 1: 63 – 71. ISSN: 2301-8968.
- Purnami, Izatun. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2010 -2013. Jakarta: Univ. Syarif Hidayatullah
- Seran, Sirilius (2017). Hubungan antara pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. *JEKT*, 10 (1) hal. 59-71
- Sembiring, Valentine Brahma Putri, dan Gatot Sasongko (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 – 2017. *International Journal of Social Science and Business*. 3(4), hal. 430-443.
- Sirait, Novlin (2013). Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, 2 [2] : 108-118.
- Soeharjoto, Mitha Rachma Oktavia (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 5 (2), hal. 94-102.
- Sopianti, Ni Komang (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran Di Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, 2 [4] : 216-225
- Pratama, Gede Krisna dan Darsana, Ida Bagus. 2019. Pengaruh Kemiskinan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 [6]
- Priyono, Dimas (2021). Analisis Pengaruh Pdrb, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 – 2018. *Diponegoro Journal Of Economics*, 10 (2), hal. 1-10.
- Putra, Dytto Adenat (2016). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kota-Kabupaten Dan Indek Pembangunan

Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2014. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Taufik, Muhammad; Rochaida, Eny; Fitriadi, Fitriadi. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015.

Toth Russell, 2013. *The Dynamics of Entrepreneurial Human Capital. Bulletin of Indonesian Economic Studies*. ISSN: 0007-4918

Wildan Syafitri. (2013). Determinants of Labour Migration Decisions: The Case of East Java, Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 49:3, 385-386, DOI:10.1080/00074918.2013.850638.